

DIPLOMASI PERUBAHAN IKLIM INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Seftina Kuswardini¹, Sannya Pestari Dewi², Frindhy Wara Limaran³
¹²³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Universitas AMIKOM Yogyakarta
¹seftina@amikom.ac.id, ²sannya.pestari.dewi@amikom.ac.id,
³frindhy.waralimaran@amikom.ac.id

Abstract

The existence of the COVID-19 pandemic that has hit all regions of the world, including Indonesia, has had a significant impact on people's mobility. The economic impact is the most felt during this pandemic, especially the reduction in industrial and manufacturing activities, but the reduction in industrial activity is considered to have a good impact on environmental security because it can reduce the amount of gas emissions. This situation should be a good opportunity for Indonesia in its efforts to tackle climate change. However, during the implementation of COP-25, it failed to reach an agreement in article 6 of the Paris Agreement and could not describe concrete actions from climate action and Indonesia only managed to take points on the oceanic issue at the meeting, while Indonesia is a pioneer country for climate change action in the G countries. -20. This raises the question of the extent of Indonesia's diplomatic efforts and commitment to climate change. This study aims to see and analyse the direction of Indonesia's climate diplomacy during the COVID-19 pandemic. The Indonesian Pavilion was a form of Indonesian diplomacy during COP-26 in the midst of the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Diplomacy, climate change, pandemic, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun. Mobilitas global mengikuti perubahan akibat adanya penyebaran virus Covid-19 yang cukup massive. Di masa awal pandemi, krisis perubahan iklim dianggap mendapatkan peluang untuk menurunkan resikonya. Data menunjukkan bahwa karantina wilayah dan pengalihan aktivitas publik ke rumah menurunkan emisi gas dunia sampai pada angka 17% di berbagai negara, bahkan 43% penurunan tersebut berasal dari sector transportasi dan industri (Suryani,2020). Kondisi ini memberikan hal positif bagi target penurunan emisi gas yang disepakati melalui Penjanjian Paris pada tahun 2015. China

sendiri mendapatkan hal baik dari adanya virus Covid-19 dengan adanya peningkatan atas kualitas udara bersih sekitar 11.4% di hampir 337 kota. Di Italia, Spanyol dan Inggris emisi gas Nitrogen Dioksida juga berkurang selama masa karantina wilayah. Oleh karenanya, penelitian dari Universitas Lund menyebutkan bahwa jika perubahan ini terus terjadi sampai pandemic berakhir, maka akan memberikan dampak terhadap tingkat emisi gas yang akan terus menurun dan menghambat terjadinya pemanasan global (Pudjiastuti,Sopian,& Hadi, 2020).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pandemic Covid-19 memiliki relevansi terhadap isu lingkungan. Namun, perubahan ini bersifat sementara dan tidak berjangka panjang, sebab aktivitas manusia tidak dapat berhenti sepenuhnya. Kehadiran kebiasaan baru membuat ruang-ruang publik kembali terbuka, sedangkan pemerintah masih terus berfokus pada penanggulangan wabah virus Covid-19. Diketahui bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun terpenting bagi dunia untuk menargetkan penurunan suhu bumi agar tak lebih dari 1,5 derajat Celcius berdasarkan kesepakatan pada perjanjian Paris (Djalal, 2021). Sedangkan, pandemic covid-19 menggantikan focus negara-negara dunia kepada penanganan dampak dari wabah ini ke berbagai sector. Kemajuan global terhadap rezim lingkungan seperti terganti dengan virus Covid-19, padahal pandemi dan krisis lingkungan saling memberikan kontribusi terhadap keberadaan satu sama lainnya. Pandemi terlihat seperti menurunkan permintaan terhadap minyak, besi dan logam, tapi pasokan bahan baku mengalami peningkatan permintaan dikarenakan transformasi ruang pribadi menjadi ruang publik (Pudjiastuti,Sopian,& Hadi, 2020). Pada akhirnya, pandemic Covid-19 memunculkan krisis lingkungan lainnya yang berdampak terhadap perubahan iklim.

Seperti contoh Indonesia mengalami peningkatan terhadap sampah plastic dan medis di masa pandemic Covid-19, meskipun terdapat penurunan emisi maksimum hingga 18.2% dan angka gas Nitrogen Dioksida di ibukota negara tropis ini menurun mencapai 40% dari tahun 2019 (Suryani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak menghentikan

dampak terhadap perubahan iklim secara signifikan. Perubahan iklim kembali tergeser oleh fokus perekonomian yang menurun akibat pandemi Covi-19. Perundingan terkait komitmen negara-negara terhadap perubahan iklim juga terpengaruh akibat pandemi ini. Perjalanan rezim lingkungan semakin melambat dari targetnya di Perjanjian Paris.

Pengaruh Indonesia terhadap isu perubahan iklim ini cukup krusial, sebab Indonesia merupakan negara berkembang yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gasnya dari 26% menjadi 29% di tahun 2030 mendatang. Faktanya ditemukan bahwa Dewan Nasional Perubahan Iklim di Indonesia telah digantikan oleh Badan REDD+ yang sampai saat ini tak menunjukkan fungsinya pada tingkat pengatur kebijakan nasional terhadap perubahan iklim (Djalal, 2021). Diplomasi Indonesia terhadap perubahan iklim tampak menurun eksistensinya di internasional selama masa pandemi covid-19 terlihat dengan kemunculan Menteri Luar Negeri tanpa adanya Presiden pada pertemuan Perjanjian Paris di tahun 2020. Hal ini berarti Indonesia mengalami kemunduran pada keterlibatannya terhadap penanganan perubahan iklim global. Indonesia yang seharusnya memberikan sumbangsih terhadap perdagangan karbon dunia, di awal pandemi seperti mengalihkan arah diplomasinya. Komitmen Indonesia dinantikan oleh dunia menjelang pertemuan Conference of Parties Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke-26 di Glassgow, sebab Indonesia dinilai sebagai bridge-builder dan problem-solver bagi negara berkembang dalam negosiasi dengan negara maju. KTT Perubahan Iklim ke-26 ini cukup penting bagi dunia sebab pertemuan ini adalah bentuk evaluasi dari komitmen setiap negara terhadap perubahan iklim, selain itu pertemuan ini sebagai wadah bagi negara berkembang meminta pertanggung jawaban dari negara maju terhadap kenaikan emisi gas akibat industri negara maju. Indonesia selama ini turut aktif dalam negosiasi terkait tuntutan dari negara maju terhadap negara berkembang. Sehingga, arah diplomasi Indonesia dalam perubahan iklim menjadi sorotan dunia, khususnya dalam keterlibatan negara berkembang pada komitmen perjanjian Paris di masa Pandemi Covid-19.

Dari jabaran latar belakang diatas maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai Bagaimana diplomasi perubahan iklim yang dilakukan Indonesia di masa Pandemi Covid-19?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis arah diplomasi perubahan iklim Indonesia di masa Pandemi Covid-19, megidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam diplomasi perubahan iklim Indonesia, memprediksi respon internasional terhadap arah diplomasi perubahan iklim Indoensia pada pertemuan KTT Perubahan Iklim ke-26, dan menjelaskan korelasi antara pandemi Covid-19 dengan krisis perubahan iklim.

Tinjauan Pustaka

Posisi Indonesia yang masuk dalam kategori salah satu negara dengan lahan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia menjadikan hal tersebut menjadi perhatian bagaimana Indonesia akan tetap memberikan kontribusi dalam aspek keamanan lingkungan. Deforestasi dan degradasi hutan Indonesia mengakibatkan pada penyumbangan emisi gas pada atmosfer dalam jumlah besar. Dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan Indonesia melakukan diplomasi lingkungan hidup yaitu secara bilateral bekerjasama dengan Norwegia dalam REDD+ Agreement yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas.

Dalam kerjasama ini kedua negara memainkan peran masing-masing berdasarkan kepentingan nasional keduanya. Indonesia berperan dalam mengimplementasikan upaya mengatasi deforestasi dan degradasi hutan agar tercipta perbaikan lingkungan hidup untuk masa yang akan datang. Nowegia sebagai negara yang menyumbangkan dana kepada Indonesia dalam menjalankan implementasi pengurangan emisi gas sekaligus membangun citra baik dalam hal dukungan perbaikan lingkungan global. Dengan adanya kerjasama kedua negara tersebut maka kepentingan kedua negara telah tercapai dengan menurunnya emisi gas Indonesia dan citra baik yang didapatkan Norwegia sebagai negara maju yang mempunyai fokus terhadap lingkungan (Pramesthi, 2019).

Selain menjalin kerjasama dengan Norwegia, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Jepang dalam hal pengurangan gas rumah kaca (GKR). Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama bilateral dalam isu perubahan iklim dengan bentuk Joint Credit Mechanism (JCM) yang mana didalam kerjasama tersebut berisi tentang inisiasi Jepang dalam mendukung negara-negara berkembang untuk mengurangi gas rumah kaca. Mekanisme yang dijalankan yaitu dengan cara Jepang memberikan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan swasta dinegaranya yang menanamkan investasi dan mengadakan proyek rendah karbon sekaligus transfer teknologi dan implementasinya di negara berkembang salah satunya Indonesia.

Dalam kerjasama ini Indonesia maupun Jepang memiliki kepentingan dan tujuan yang sangat jelas keduanya sebagai anggota UNFCCC ingin menjalankan kewajiban untuk melakukan pengurangan gas rumah kaca. Jepang sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca memiliki program secara internal domestik maupun eksternal dengan mendukung negara-negara berkembang dalam menjalankan proyek dan industri ramah lingkungan yang meliputi sektor energi, industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara paru-paru dunia menyambut baik kerjasama JCM bersama Jepang sebagai bentuk komitmen dalam penanganan perubahan iklim dan mendukung upaya negara-negara maju dalam membantu negara-negara berkembang mewujudkan pengurangan emisi gas rumah kaca (Liana, 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan rezim perubahan iklim merupakan wadah bagi negara-negara dalam menjalankan komitmennya. Paris Agreement merupakan bentuk optimisme internasional dalam mendorong negara maju dan negara berkembang dalam memperbaiki situasi perubahan iklim dunia. Selain implementasi kerjasama bilateral dalam perubahan iklim diperlukan juga kontribusi dan peran organisasi regional sebagai bentuk tanggungjawab bersama untuk menjaga iklim dikawasan. Melihat peran ASEAN sebagai organisasi kawasan dalam mengatasi isu perubahan iklim, terdapat dinamika yang mana semakin hari komitmen ASEAN semakin terlihat dalam mendorong negara-negara Asia Tenggara

dalam mengurangi dan membatasi emisi gas nya. Dimulai pada 1977 Asean Environmental Programme (ASEP) yang berisi tentang kesepakatan mengenai lingkungan hidup dan dilanjutkan dengan berbagai bentuk program lain namun hal tersebut masih dalam bentuk yang tidak mengikat. Sampai pada Jakarta Declaration on Environment and Development 1997 untuk pertama kalinya menghasilkan kesepakatan dalam bentuk dokumen. Negara-negara ASEAN menunjukkan komitmennya dengan aktif dalam keanggotaan UNFCCC dan Paris Agreement, hal tersebut merupakan dorongan dari deklarasi ASEAN dalam mendukung isu perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Andreas, 2020).

Secara garis besar, pemerintah Indonesia telah berusaha mematuhi komitmennya dengan Paris Agreement melalui Kerjasama Joint Crediting Mechanism dengan Jepang, namun pada implementasinya, proyek Jakabaring yang menjadi pilot project dari Kerjasama tersebut mengalami masalah finansial pada pengembangannya dikarenakan kurangnya insentif dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan yang tinggi antara retorik pemerintah dan realitanya. Ini diperlihatkan dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Paris Agreement, namun kurangnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan sektor swasta, termasuk masyarakat sipil, serta dominasi dari perusahaan yang menghasilkan karbon tinggi masih mempengaruhi diplomasi iklim pemerintah Indonesia (Robertua & Sihura, 2020).

Efektivitas diplomasi iklim bisa dilihat dari komitmen negaranya dengan melakukan sinkronisasi perspektif internasionalnya terhadap perubahan iklim dengan perspektif nasional. Penelitian ini menggunakan Gambia sebagai studi kasus, Gambia merupakan negara yang tergolong Least Developed Country (LDC), negara yang masih kekurangan pengaruh dan kapasitas untuk mengakses diskusi-diskusi ataupun negosiasi di internasional untuk perubahan iklim berdasarkan kondisi negaranya di internasional. Namun, pada kenyataannya negara ini berhasil melakukan bentuk diplomasi iklim yang efektif dibandingkan negara berkembang di atasnya. Komitmen Gambia dinilai efektif, sebab negara ini berhasil

menjadikan masalah perubahan iklim sebagai kepentingan nasionalnya, sehingga rencana pembangunan dan pendekatan dengan media negara ini berfokus kepada diplomasi iklim (Jallow & Craft, 2014). Upaya yang dilakukan oleh Gambia dapat dijadikan referensi untuk negara-negara berkembang dalam diplomasi iklim, termasuk Indonesia sebab peluang bagi Indonesia mengakses kapasitas program perubahan iklim di dunia internasional akan lebih mudah dibandingkan negara LDCs.

Dengan adanya kerjasama bilateral maupun multilateral yang dilakukakn Indonesia dalam melakukan diplomasi perubahan iklim, maka tidak dapat diragukan lagi Indonesia berkomitmen dalam menjalankan implementasi penanganan perubahan iklim baik secara bilateral maupun dalam kerangka regional. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan diplomasi perubahan iklim Indonesia pada masa Pandemi Covid-19. Selain itu juga dalam penelitian ini menjelaskan seberapa jauh keadaan pandemi membawa perubahan iklim terhadap lingkungan Indonesia dan memberikan pengaruh terhadap diplomasi iklim Indonesia.

PEMBAHASAN

Komitmen Indonesia terhadap Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia telah menjadi bagian dari rezim perubahan iklim global sejak kemunculan protokol Kyoto sampai dengan digantikannya oleh Perjanjian Paris. Indonesia cenderung aktif dalam forum-forum internasional terkait perubahan iklim. Indonesia sejak tahun 2016 telah meratifikasi Perjanjian Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 diikuti dengan laporan pertama kontribusi Nationally Determined Contribution (NDC). Diawal laporan, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dan 41% melalui kerjasama internasional. Sebagai pioneer dalam aksi lingkungan, Indonesia menunjukkan komitmen lainnya dengan tercapainya 49 dari 67 indikator MDGs pada akhir tahun 2015, bahkan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon tertuang dalam RPJMN 2020-2024 melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan dokumen NDC Indonesia,

komitmen penurunan emisi sebesar 29% untuk scenario *business as usual* di tahun 2030. Strategi yang dilakukan oleh Indonesia dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomo 61/2011 untuk memberikan kejelasan hukum terhadap ambisi target penurunan emisi gas tersebut. Di tahun 2017, upaya yang dilakukan oleh pemerintah semakin meluas dengan mengesahkan Perataturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Skema ini memberikan pendanaan terhadap pemulihan lingkungan hidup; penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan, serta konservasi. (Nurbaya, 2019).

Pada perjalanannya, isu perubahan iklim telah menjadi perhatian Indonesia sejak keikutsertaan dalam pertemuan di Rio tahun 1992, setelah itu Indonesia ikut meratifikasi kerangka kerja UNFCC melalui UU Nomor 6 Tahun 1994, hingga meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Upaya tersebut semakin optimis dengan target 29% penurunan emisi gas rumah kaca secara mandiri, dan 14% dari pihak lain. Tidak hanya itu, target tersebut dibarengi dengan adanya sistem inventaris gas rumah kaca nasional berbasis web dengan tujuan mengakomodasi data tentang kegiatan lembaga terkait, termasuk dari tingkat daerah. Wujud lain dari upaya Indonesia dalam merespon perubahan iklim ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia tentang nilai ekonomi karbon (*carbon pricing*). Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan Pojok Iklim selama Februari 2019 sampai dengan Juni 2020. Pojok iklim ini merupakan kegiatan diskusi berkala setiap Rabu yang dilakukan dengan menghadirkan pakar terkait serta kementerian lainnya untuk membahas upaya penurun emisi gas rumah kaca. Program lain yang diupayakan oleh Ditjen PPI adalah Festival Iklim dan Kampung Iklim. Festival Iklim merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas dan *stakeholder* terkait tentang pengendalian perubahan iklim, sedangkan Kampung Iklim adalah desa binaan yang masyarakatnya telah melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Meskipun

untuk kegiatan Festival Iklim masih dilakukan secara daring di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 (Patrianti, Shabana, & Tuti, 2020).

Selain dengan Norwegia, komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim juga terwujud dalam kerjasama *Joint Credit Mechanism (JCM)* dengan Jepang. Kerjasama ini biasa dilakukan Jepang dengan negara-negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan rendah karbon, secara khususnya kerjasama ini menargetkan akan ada transfer teknologi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerjasama ini merupakan implementasi dari pasal 6 dari Perjanjian Paris yaitu mengenai pencapaian ambisi aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim (Hasanah, 2019). Berdasarkan data Ditjen PPI, saat ini terdapat delapan agenda kerjasama dan pendanaan dari organisasi luar, seperti UNDP dan Bank Dunia untuk mengatasi pengendalian perubahan iklim. Indonesia juga sedang berusaha menjalankan mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Forest Deforestation and Degradation*) untuk konservasi, manajemen hutan berkepanjangan, dan peningkatan stok karbon hutan. Indonesia juga bekerjasama dengan Uni Eropa melalui program *Support to Indonesia's Climate Change Response (SICCR)* sejak tahun 2016 (Aisya, 2019).

Upaya-upaya diatas merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim sejak Indonesia mengeluarkan laporan pertama terkait NDC Indonesia. Target Indonesia sendiri cukup signifikan mencapai 70% secara keseluruhan dengan mandiri dan kerjasama internasional. Hal ini menampilkan tanggungjawab Indonesia ditengah krisis terkait lingkungan sendiri masih menjadi salah satu hambatan pencapaian target tersebut, khususnya deforestasi dan lahan. Dilema Indonesia dalam berkomitmen terhadap NDC lainnya adalah komoditas kelapa sawit. Indonesia mengandalkan ekspor kelapa sawit terutama ke negara-negara di Eropa. Masalah alih fungsi lahan kelapa sawit ini menjadi sorotan bagi Eropa, sebab ini menghilangkan serapan emisi gas rumah kaca. Hal ini yang menyebabkan pemenuhan NDC Indonesia cenderung melambat, selain itu penyesuaian kebijakan hingga ke tingkat daerah juga menjadi kendala bagi Indonesia untuk berkomitmen penuh terhadap perubahan iklim, Terutama

di masa pandemic Covid-19, kendala terkait pemenuhan NDC ini semakin terlihat sebab kebanyakan kebijakan harus tertunda dikarenakan penyesuaian terhadap pandemic Covid-19. Kemudian, Indonesia berusaha untuk tetap menjalankan peran sebagai pioneer dalam aksi iklim pada COP-26 di Glassglow dengan melaksanakan beberapa program pengendalian iklim menjelang negosiasi COP-26 agar mencapai kesepakatan nyata dari implementasi Perjanjian Paris.

Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia pada masa Pandemi Covid-19

Indonesia tidak pernah berhenti untuk turut serta dalam memenuhi komitmen partisipasinya pada isu perubahan iklim. Sepanjang masa pandemi covid-19 2020 hingga 2022 tidak menghalangi Indonesia memberikan kontribusi baik dalam bentuk dukungan dan kerangka kerja terkait perubahan iklim. Pada tahun 2020 dimulai dengan kerjasama Uni Eropa dan Indonesia dalam agenda Pekan Diplomasi Iklim 2020 yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan mengusung tema “Act Today for Our Tomorrow” merupakan sebuah aksi kampanye global dan kerjasama kolaboratif dalam mendukung perubahan iklim yang lebih baik.

Kegiatan tersebut dalam bentuk pertukaran pengetahuan melalui webinar dan juga konservasi hutan mangrove di Jakarta. Tidak hanya menjadi tuan rumah bagi Pekan Diplomasi negara-negara Uni Eropa, Indonesia juga berencana meningkatkan upaya mitigasi perubahna iklim dengan cara menjadikan kebijakan iklim bagian dari rencana jangka panjang dan menengah pembangunan nasional. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu mengenai program pembangunan rendah karbon ketahanan iklim (BAPPENAS, 2020).

Rencana aksi mitigasi iklim juga dipaparkan Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow 2021. Melalui Pavillium Indonesia dengan melibatkan lebih dari 3000 peserta yg hadir secara langsung dengan tujuan untuk mewujudkan keberhasilan soft diplomacy Indonesia di putaran COP26 UNFCCC. Salah satu komitmen Indonesia

dalam COP26 UNFCCC yang dipaparkan adalah arah Indonesia untuk mencapai Net Sink FoLU pada tahun 2030 yaitu penyerapan lebih tinggi dibanding emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sektor kehutanan dan lahan berperan hingga 60% dari komitmen Indonesia untuk mencapai penurunan emisi GRK pada tahun 2030 yaitu sebesar 41% dari bussines as usual beserta dukungan internasional (Rusyanto 2021).

Tepat pada KTT COP26 digelar Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia menyampaikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam menjalankan komitmennya sebagai negara pihak. Adapun upaya-upaya tersebut yaitu deforestasi yang turun sangat signifikan selama dua puluh tahun terakhir, rehabilitasi hutan mangrove mencapai 600 hektar terluas di dunia, kasus kebakaran hutan yg turun sangat signifikan yaitu mencapai 82% dan perbaikan lahan kritis yangmenjapai tiga juta lahan dalam 9 tahun. Sedangkan untuk melanjutkan upaya mitigasi tersebut Indonesia merencanakan beberapa langkah seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan industri berbasis energi bersih, pengembangan penggunaan mobil listrik dan pembangunan lingkungan industri hijau di wilayah Kalimantan dan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Untuk mewujudkan rencana net zero carbon Indonesia meminta dukungan negara-negara maju sebagai game changer dalam hal pendanaan dan transfer teknologi (SETKAB 2021).

Bukan hanya dalam COP26 UNFCCC saja Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meredam emisi gas rumah kaca dan pengendalian iklim nasionalnya. Indonesia juga berencana akan mengangkat isu lingkungan dalam pertemuan G20 2022. Tiga hal yang diusung Indonesia dalam pertemuan G20 mnegenai isu lingkungan yaitu supporting more sustainable recovery, enhancing land-and sea-based actions to support environment protection and climate objectives, enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives. Ketiga isu tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap perbaikan iklim yang berkelanjutan (Henry, 2022).

Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta G20 dalam menjabarkan lebih spesifik mengenai enam agenda isu lingkungan meliputi, kerusakan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, keberadaan sampah di laut, pengelolaan air, efisiensi konsumsi sumberdaya, keuangan berkelanjutan dan perlindungan laut. Indonesia juga mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota mengenai upaya perbaikan dan konservasi hutan mangrove dan lahan gambut secara besar-besaran yang saat ini sedang dijalankan. Pembahasan mengenai Iklim pada agenda G20 diharapkan oleh para delegasi menjadi sebuah bentuk dukungan terhadap COP26 UNFCCC yang telah digelar sebelumnya. Paling penting yaitu para negara delegasi G20 memberikan dukungan terkait mobilisasi terkait dana, riset, teknologi dan peningkatan kapasitas terhadap isu-isu lingkungan (KEMLU 2022).

Berdasarkan Updated NDC Indonesia di tahun 2021, Indonesia berfokus kepada lima sektor mitigasi perubahan iklim yakni kehutanan, energi, limbah, pertanian, dan IPPU (Proses Industri dan Penggunaan Produk) dan pengalokasian dana untuk target NDC terbaru Indonesia sekitar 4,1% dari anggaran negara. Upaya ini juga dibantu melalui NDC Partnership dengan Pemerintah Jerman, World Resources Institutes, dan Bank Dunia dalam program Build Back Better dengan Low Carbon Development Initiative (BAPPENAS, 2021). Indonesia memperlihatkan kepada internasional terutama negara-negara G-20 bahwa Indonesia masih *stay* dalam komitmen Perjanjian Paris meskipun kondisi domestik masih baru pulih dan beradaptasi dari pandemi Covid-19.

Respon Internasional Pada KTT Perubahan Iklim ke-26

Berakhirnya pertemuan global terbesar untuk penanganan perubahan iklim COP26 di Glasgow, Scotland, Britania Raya akhir taun 2021 lalu menghasilkan berbagai paket keputusan negara-negara sebagai bentuk komitmen dan dukungan mereka dalam mencapai net zero emission. Diantaranya dua hasil utama dari COP26 yaitu penandatanganan dan ratifikasi pakta iklim Glasgow, serta finalisasi buku aturan Paris Agreement.

Komitmen negara-negara yang masih berlangsung sampai dengan masa pandemi, salah satunya adalah pelaksanaan nationally determined contributions (NDC). Bentuk lanjutan dari pelaksanaan NDC sebagai komitmen negara-negara pada UNFCCC berupa peningkatan kerangka transparansi di bawah Paris Agreement, menggunakan mekanisme akuntabilitas dengan tujuan mempromosikan implementasi rencana dan aliran dukungan untuk aksi iklim nasional. Sistem pelaporan NDC terbaru ini dibuat menjadi lebih ketat dari sebelumnya yaitu setiap dua tahunan, di mana pihak negara-negara ini diminta memberikan informasi terkait emisi dan serapan gas rumah kaca nasionalnya masing-masing, kemudian kemajuan dalam penerapan serta pencapaian NDC, sumber daya keuangan, pengembangan dan transfer teknologi, juga peningkatan kapasitas yang disediakan dan diterima (UNFCCC, 2021). Negara-negara maju di COP26 mengupayakan pemberian bantuan biaya kepada negara-negara berkembang untuk menekan emisi gas rumah kaca, dengan menyediakan sebesar 100 miliar dollar setiap tahunnya. Komitmen lain yang telah disepakati bersama dan segera menjadi agenda kerja masing-masing negara adalah penghentian bertahap penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan subsidi bahan bakar fosil (UNFCCC, 2021). Upaya penghentian dan pengurangan bertahap ini akan diganti dengan energi bersih terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang pasti hampir di setiap wilayah dunia tersedia. Sejumlah 42 pemimpin negara telah menyampaikan bahwa mereka akan mengakhiri penggunaan energi batu bara, penetapan tanggal serta penutupan dana publik internasional untuk batu bara pun telah ditetapkan (UKCOP26, 2021).

Berdasarkan hasil ringkasan laporan dari kepresidenan COP26 (2021), terdapat beberapa komitmen kerja sama negara-negara untuk mencapai tujuan iklim, bersama dengan sektor swasta, organisasi internasional dan masyarakat sipil, yaitu: *pertama*, lebih dari 40 pemimpin dunia bergabung dalam the Glasgow Breakthrough Agenda, sebuah rencana 10 tahun kerja sama untuk menciptakan lapangan kerja hijau dan pertumbuhan global, menjadikan teknologi serta solusi bersih sebagai pilihan yang terjangkau, mudah diakses, menarik, sebelum tahun 2030, dimulai dengan listrik,

transportasi darat, baja, hidrogen, dan pertanian, *kedua*, lebih dari 120 negara yang mencakup sebesar 90% hutan dunia, mendukung deklarasi pemimpin Glasgow terkait penggunaan lahan dan hutan, dengan komitmen mereka untuk bekerja secara kolektif sebagai upaya menghentikan serta mengembalikan hutan yang hilang dan degradasi lahan pada tahun 2030, didukung oleh komitmen dana publik terbesar untuk hutan konservasi, juga global roadmap sebagai upaya membuat 75% rantai pasokan komoditas hutan berkelanjutan, *ketiga*, diumumkannya kemitraan transisi energi yang adil untuk mendukung usaha dekarbonisasi Afrika Selatan, melalui kolaborasi kuat antara ekonomi yang sedang berkembang dengan mitra internasional, dan *keempat*, peluncuran ikrar metana global, melihat lebih dari 100 negara yang telah berkomitmen secara kolektif untuk mengurangi emisi metana global sebesar 30% di tahun 2030 (UKCOP26, 2021).

Krisis iklim ditengah pandemi sejatinya menjadi tantangan baru bagi negara-negara dunia, di mana tanggung jawab mereka sebagai negara untuk melindungi warganya bertambah dari wacana lingkungan menjadi permasalahan kesehatan pula. Maka dari itu, bersama dengan WHO, pada pertemuan COP26 lalu, terdapat 50 negara berkomitmen mengembangkan sistem kesehatan yang tahan akan iklim dan rendah karbon. Negara-negara tersebut beberapa diantaranya merupakan negara yang rentan terhadap bahaya kesehatan akibat dari perubahan ekstrem iklim, serta mereka diantaranya adalah negara penghasil karbon tertinggi dunia. Sejumlah 45 negara telah berkomitmen untuk mengubah sistem kesehatan mereka menjadi berkelanjutan dan rendah karbon, bahkan telah terdapat 14 negara yang menetapkan tanggal target pencapaian net zero emission sebelum tahun 2050 (WHO, 2021). Diantaranya negara-negara yang telah berkomitmen dalam mencapai sistem kesehatan berkelanjutan dan rendah karbon, yaitu Argentina, Fiji, Malawi, Spanyol, Uni Emirat Arab, AS, serta 39 negara lainnya. Kemudian, negara-negara dengan komitmen meningkatkan sistem ketahanan iklim sekaligus sistem kesehatan mereka diantaranya Bangladesh, Ethiopia, Maladewa, Belanda, dan 45 negara lainnya (WHO, 2021).

Nampak dari hasil pertemuan COP26 bahwa banyak kesepakatan yang dirasa akan efektif dalam aksi krisis iklim, tetapi tidak sepenuhnya upaya dari negara-negara tersebut membuahkan hasil manis, bahkan hanya untuk penurunan emisi gas rumah kaca melalui NDC masing-masing. Berdasarkan laporan terbaru yang diterima UNFCCC pada 2021 lalu, ditegaskan Kembali bahwa dari NDC 192 negara, diperkirakan akan terjadi peningkatan cukup besar, yaitu sekitar 16% dalam emisi gas rumah kaca global di tahun 2030, dibandingkan pada tahun 2010. Perbandingan hasil penemuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), memperkirakan peningkatan tersebut dapat menyebabkan kenaikan suhu sekitar 2.7°C pada akhir abad ini, kecuali terdapat tindakan cepat dari negara-negara dalam meresponnya (UNFCCC, 2021). Tidak seluruhnya pemerintahan di setiap negara-negara bersungguh-sungguh pada komitmen mereka untuk segera melakukan tindakan pencegahan perubahan iklim, terutama dengan melakukan perombakan kebijakan lingkungan mereka serta upaya penghentian berkala penggunaan bahan bakar fosil (batu bara, metana, dan lainnya). Terlebih lagi pada situasi pandemi yang secara bersamaan menimbulkan resesi dan perubahan fungsi sosial pada masing-masing negara di dunia.

Sebagai salah satu negara dengan kontribusi penting karena besarnya potensi alam yang Indonesia miliki, menjadikan Joko Widodo selaku kepala negara terus berupaya berkontribusi dalam penanganan aksi iklim. Langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi krisis iklim di masa pandemi sama seperti negara-negara lainnya, salah satunya terkait optimalisasi pelaksanaan NDC. Dipaparkan oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dalam pertemuannya dengan Alok Sharma, Presiden COP26 UNFCCC, bahwasanya berdasarkan perhitungan angka emisi karbon dari segala sektor melalui NDC, diperkirakan Indonesia akan mencapai karbon netral dan dapat menyimpan karbon sebanyak 140 juta ton khususnya di sektor kehutanan, pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Namun, terdapat tantangan serta hambatan bagi Indonesia dalam upayanya mengelola pergantian sumber energi fosil

menjadi energi-energi terbarukan yang berkelanjutan, di mana disitu diperlukannya investasi dan dukungan teknologi melalui kerja sama oleh berbagai pihak, agar dapat memenuhi kebutuhan alternatif dari aksi iklim. Selaku presidensi COP26, Alok Sharma mengapresiasi setiap tindakan yang sudah Indonesia lakukan sebagai bentuk penanganan perubahan iklim. Melalui kunjungan langsungnya ke Jakarta, Alok berupaya memperkuat komitmen antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris dalam mencegah kenaikan suhu bumi menjadi dibawah 1.5°C. Apresiasi Alok terhadap Indonesia kembali hadir saat Jokowi melalui upayanya, menekan laju deforestasi hutan menjadi yang terendah sepanjang sejarah nasional, serta langkah-langkah terstrukturnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, di mana hal tersebut berkontribusi besar pada penurunan emisi karbon Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Menurut hasil siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2021), pemerintahan Inggris juga menawarkan kepada Indonesia program *Investment in Nature and Forests* (INAFOR) melalui kerangka *nature based solutions* sebagai bentuk dukungan dan upaya mendorong keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi dari aktivitas deforestasi serta lahan gambut. Pemerintah Inggris menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu elemen penting keberhasilan Inggris sebagai tuan rumah COP26, karena Indonesia merupakan negara *superpower* di bidang perubahan iklim. Kepercayaan tersebut berlanjut hingga kerja sama dalam dialog *Forestry, Agriculture and Commodity Trade* (FACT) yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

KESIMPULAN

Kegagalan pencapaian kesepakatan di COP-25 membawa Indonesia terus berperan aktif menyuarakan kepentingan terkait pengendalian perubahan pada pertemuan COP-26. Sejak tahun 1992, Indonesia telah berusaha berkomitmen terhadap perubahan iklim dengan mengikuti pertemuan di Rio, kemudian meratifikasi kerangka kerja awal UNFCCC, sampai dengan meratifikasi Perjanjian Paris. Upaya Indonesia tersebut semakin diperkuat dengan laporan target NDC Indonesia melalui kerjasama

internasional menjadi salah satu bentuk komitmen Indonesia pada isu perubahan iklim. Menjelang COP-26, Indonesia juga aktif melakukan diplomasi dengan negara-negara anggota G-20 melalui diskusi interaktif menghadirkan pakar dan menampilkan bentuk-bentuk adaptasi-mitigasi yang telah berhasil dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Paviliun Indonesia menjadi wadah bagi negara-negara untuk bernegosiasi menuju pertemuan COP-26. Diplomasi Indonesia dalam perubahan iklim terus konsisten meskipun cenderung lamban, dikarenakan harmonisasi kebijakan sebelumnya dengan kebijakan yang berbasis lingkungan. Ditengah perdebatan produk kelapa sawit di Eropa terkait dengan masalah alih fungsi lahan, Indonesia tetap berusaha memenuhi komitmennya dengan Perjanjian Paris serta mewadahi kepentingan-kepentingan negara berkembang pada COP-26. Hambatan Indonesia terhadap penerapan kebijakan perubahan iklim masih dalam tahap integrasi kebijakan ke level daerah dan berbagai sektor serta pendanaan yang tidak bisa ditanggung negara sendiri. Dukungan pendanaan internasional terutama negara maju kepada negara berkembang masih menjadi isu yang diupayakan Indonesia pada forum COP-26, agar pencapaian dalam kesepakatan di setiap pertemuan COP-26 memberikan implementasi kerja nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Pramudianto, 2016, Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020, Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 18 No. 1 76-91 Mei 2016 E-ISSN 2579-8251
- Bakry, U. S. (2016). Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional. Deepublish hal. 60
- BAPPENAS, 2020, Pekan Diplomasi Iklim 2020 dimulai Dengan Ajakan Unyuk Beraksi Hari Ini Untuk Masa Depan Kita, tersedia dalam <https://bappenas.go.id/berita/pekan-diplomasi-iklim-2020-dimulai-dengan-ajakan-untuk-beraksi-hari-ini-untuk-masa-depan-kita>, diakses pada 15 Agustus 2022
- BAPPENAS. (2021). Updated Ndc Indonesia Untuk Masa Depan Yang Tangguh Iklim. Available at: <http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/> (Accessed : 20 Agustus 2022)

- Carver, D. (2022) *What were the outcomes of COP26?* (Online). Available at: <https://commonslibrary.parliament.uk/what-were-the-outcomes-of-cop26/> [Accessed: 28 Juni 2022]
- Djalal, Dino Patti. (2021). "Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia". Kompas, 25 Januari 2021, Jakarta tersedia dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/25/diplomasi-perubahan-iklim-indonesia>, diakses pada 16 Oktober 2021
- European Commission. (2021) *COP26: EU helps deliver outcome to keep the Paris Agreement targets alive* (Online). Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6021 [Accessed: 28 Juni 2022]
- Hasanah, L., 2019. Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(2), pp.142-155.
- Henry, 2022, Isu Lingkungan Yang dibahas di Pertemuan Kedua EDM-CSWG G20 di Jakarta, tersedia dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4991525/3-isu-lingkungan-yang-dibahas-di-pertemuan-kedua-edm-cswg-g20-di-jakarta>, diakses pada 16 Agustus 2022
- Iriani, M.L., 2022. The Energy Transition Dilemma in European Union (EU Region). *Jurnal Dinamika Global*, 7(1), 122-135.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/980/335>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021) Presiden COP-26 UNFCCC: Indonesia Climate Super Power (Online). Available at: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5878/presiden-cop-26-unfccc-indonesia-climate-super-power> [Accessed: 1 Juli 2022]
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021) Presiden COP-26 Glasgow untuk Iklim: Indonesia Negara Penting (Online). Available at: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4041/presiden-cop-26-glasgow-untuk-iklim-indonesia-negara-penting [Accessed: 1 Juli 2022]
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021) Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Perubahan Iklim di COP26 (Online). Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-dalam-penanganan-perubahan-iklim-di-cop26> [Accessed: 27 Juni 2022]
- KEMLU, 2022, Delegasi G20 EDM CSWG Dukung Komitmen Global Tangani Permasalahan Lingkungan dan Perubahan Iklim, tersedia dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/3438/siaran_pers/delegasi-g20-

edm-cswg-dukung-komitmen-global-tangani-permasalahan-lingkungan-dan-perubahan-iklim, diakses pada 18 Agustus 2022

- Liana Hasanah, Viani Puspitasari, 2019, Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Joint Credit Mechanism Pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia, *Padjajaran Journal of International Relations* e-ISSN: 2684-8082 Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (142-155) doi: 10.24198/padjir.v1i2.26131
- Nurbaya, Siti dkk. (2019). *Trilogi Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Urgensi, Politik Dan Tata Kelola Perubahan Iklim*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Patrianti, T., Shabana, A. and Tuti, R.W., 2020. Komunikasi Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim *Government Risk Communication On Greenhouse Gas Emission Reduction To Tackle Climate Change*. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), pp.156-170.
- Pramesthi Cahyani Hedhi Ningsih, 2019, Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+Agreement, *Insignia Journal of International Relations* Vol. 6, No.2, November 2019, 83-93 P-ISSN: 2089-1962; E-ISSN: 2597-9868
- Pudjiastuti, S. R., & Hadi, N. (2020). The Effect of Corona Virus on the Global Climate. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 4(2), 130-136.
- Rusyanto, 2021, Libatkan Lebih Dari 1000 Pengunjung Paviliun Indonesia Dukung Diplomasi Perubahan Iklim, tersedia dalam <https://investor.id/international/270802/libatkan-lebih-dari-10000-pengunjung-paviliun-indonesia-dukung-diplomasi-perubahan-iklim>, diakses pada 15 Agustus 2022
- Sari, S. & Nirmala, M.P. (2019). Kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam Mengoptimalkan Implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+): Studi Kasus Hutan Ulu Masen Aceh Tahun 2013-2017. *Jurnal Dinamika Global*, 4(2), 249-268. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/133>
- SETKAB, 2021, Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia Dalam Penanganan Perubahan Iklim di COP26, tersedia dalam <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-dalam-penanganan-perubahan-iklim-di-cop26/>, diakses pada 16 Agustus 2022
- Suryani, A. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global. *Info Singkat*, 12 tersedia dalam https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-13-I-P3DI-Juli-2020-236.pdf, diakses pada 17 Oktober 2021

- UN Climate Change Conference UK. (2021) *COP26 WORLD LEADERS SUMMIT-PRESIDENCY SUMMARY* (Online). Available at: <https://ukcop26.org/cop26-world-leaders-summit-presidency-summary/> [Accessed: 1 Juli 2022]
- UN Climate Change Conference UK. (2021) *STATEMENT ON INTERNATIONAL PUBLIC SUPPORT FOR THE CLEAN ENERGY TRANSITION* (Online). Available at: <https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/> [Accessed: 1 Juli 2022]
- UN Environment Programme. (2021) *COP26 ends with agreement but falls short on climate action* (Online). Available at: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop26-ends-agreement-falls-short-climate-action> [Accessed: 28 Juni 2022]
- UNFCCC. (2021) *COP26 Outcomes: Transparency and Reporting* (Online). Available at: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-transparency-and-reporting#eq-8> [Accessed: 29 Juni 2022]
- UNFCCC. (2021) *The Glasgow Climate Pact – Key Outcomes from COP26* (Online). Available at: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26> [Accessed: 29 Juni 2022]
- UNFCCC. (2021) *Update NDC Synthesis Report: Worrying Trends Confirmed* (Online). Available at: <https://unfccc.int/news/updated-ndc-synthesis-report-worrying-trends-confirmed> [Accessed: 29 Juni 2022]
- WHO. (2021) *Countries commit to develop climate-smart health care at COP26 UN climate conference* (Online). Available at: <https://www.who.int/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference> [Accessed: 29 Juni 2022]